BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pendidikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, 2003).

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok individu melalui pengayaan pengetahuan dan penguatan kesadaran. (Gatara & Sofhian, 2012: 6). Adapun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, fungsi Pendidikan Nasional yaitu : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan *(Civic Education)* juga dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa,usia, dan suku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan siswa dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki secara sistematis, jujur dan disiplin.

(Samsiar, 2017:49-50) Mengatakan Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mewujudkan warga negara yang dapat memberikan sikap bela negara dilandaskan pada pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan dalam mengembangkan jati diri serta moral bangsa. Oleh sebab itu, siswa sebagai calon generasi penerus, harus dibekali pengetahuan tersebut melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari tujuan tersebut seorang guru harus dapat menerapkan strategi pembelajaran yang mampu memfokuskan pada tiga komponen pengembangan atau kompetensi dasar dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan *(Civic Knowledge)*, sikap kewarganegaraan *(Civic Dispositions)*, dan keterampilan kewarganegaraan *(Civic Skills)* secara terintegrasi (Rusnila, 2016:2).

Komponen pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang terus menerus diajukan yaitu: apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahannya, apa dasar sistem politik Indonesia, bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, bagaimana hubungan Negara Indonesia dengan Negara lain dan posisinya mengenai masalah nasional, dan apa peran warga dalam demokrasi Indonesia.. Penuangan materi pengetahuan kewarganegaraan dalam bentuk pertanyaan dimaksudkan bahwa prosesnya merupakan sesuatu yang disengaja dan prosesnya tidak pernah berakhir. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam hal ini siswa untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran Pendidikan Kewaraganegaraan adalah Pengetahuan Kewarganegaraan *(Civic Knowledge)*. Pengetahuan kewarganegaraan *(Civic Knowledge)* berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara,sedangkan *Civic Knowledge* yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki individu warganegara dalam aspek pengetahuan tentang ilmu kewarganegaraan. Budimansyah (2010: 29) mengemukakan bahwa: “Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara”. *Civic knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Sejalan dengan pendapat di atas

Wahidmurni, dkk. (2010: 18) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu menunjukan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar (*civic knowledge*) dari segi kognitif dapat diukur melalui tes yang diberikan guru. Namun kenyataannya penguasaan pengetahuan kewarganegaraan siswa di kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti sangat rendah dilihat dari ulangan umum semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 ketuntasan kurang lebih 55,7 % dari seluruh jumlah siswa di kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti. Dengan rata-rata nilai 65, padahal kriteria ketuntasan minimum yang telah ditetapkan sekolah adalah 70. Pada saat proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berlangsung masih banyak siswa yang belum memahami mengenai materi ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang di sampaikan, sehingga nilai siswa yang belum dapat memenuhi ketuntasan belajar yaitu belum mampu menyelasaikan, mengusai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran pada saat dilakukan evaluasi.

Adapun faktor yang menjadi penyebabnya yaitu pada saat proses pembelajaran siswa hadir di kelas dengan persiapan belajar yang tidak memadai seperti siswa tidak memiliki buku paket dan juga hanya menggunakan lembar kerja siswa (LKS) Model pembelajaran yang digunakan dominan menggunakan model konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab, sehingga menimbulkan kebosanan bagi siswa saat pembelajaran berlangsung, jika siswa sudah bosan maka materi apapun yang disampaikan guru tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kegiatan belajar siswa cenderung hanya mendengarkan,

mencatat dan menghafal, hal tersebut membuat partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya, menanggapi maupun guru melakukan sesi tanya jawab, siswa kurang memberikan respon yang baik, hanya ada beberapa siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru.

Selain melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas VIII, peneliti juga melakukan wawancara kepada guru PKn. Hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa respon dan sikap siswa selama kegiatan berlangsung masih pasif, hanya ada beberapa siswa saja yang aktif, kebanyakan mereka masih malu untuk mengeluarkan pendapat dan siswa sulit memahami materi ketaatan terhadap perundang-undangan nasional yang telah disampaikan walaupun guru sudah semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi tersebut. Dengan permasalahan yang ada, penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan mendesain model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledeg*). Atau dengan kata lain bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, yaitu tentang bagaimana upaya yang di lakaukan oleh guru untuk meningkatkan *civic knowledge* siswa pada mata pelajaran PKn, Guru dapat memilih salah satu model pembelajaran.

Komalasari, (2010: 57) mengemukakan bahwa: "Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru". Salah satunya adalah model pembelajaran *Controversial Issues*. Muessig (Komalasari, (2010: 269) mengemukakan bahwa: *"Controversial Issues* (isu kontroversial) adalah sesuatu

yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh orang atau kelompok lain". *Controversial Issues* marupakan salah satu model pembelajaran kontekstual. Penerapan model ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami isu-isu dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan siswa. Siswa diajak untuk mampu mengambil keputusan dengan alasan atau pertimbangan yang rasional didukung dengan fakta, konsep, dan prinsip yang akurat (Komalasari, 2010: 259). Adapun alasan peneliti menggunakan model pembelajaran *controversial issues* agar siswa aktif, kreatif, dan berpikir secara kritis mengenai isu-isu kewarganegaraan yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran.

Melalui model pembelajaran ini siswa belajar untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan opini orang lain, mencari informasi, menyadari adanya perbedaan, membangun empati dan pengertian, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dengan pembelajaran isu-isu kontroversial siswa akan mengamati, memikirkan, dan bertindak menghadapi situasi tertentu, siswa lebih menyakini apa yang diamati dan menemukan banyak cara untuk mencari jalan keluar tentang isu-isu kontroversial. Pengamatan seperti di atas akan membantu siswa mengembangkan daya berpikir secara sistematis dan logis, sehingga siswa mampu mengambil keputusan yang tepat. Pembelajaran menggunakan model *controversial issues* yang dimana pembelajarannya menyajikan isu-isu controversial akan membantu siswa dalam mengembangkan daya intelektual dan keterampilan Pengetahuan Kewarganegaraan secara lisan maupun secara tulisan. harapan peneliti melalui model pembelajaran *controversial Issues*, upaya guru dalam meningkatkn *civic knowledge* siswa dapat tercapai.

Terlihat dari uraian di diatas bahwa pentingnya *civic knowledge* siswa ditingkatkan melalui model pembelajaran tertentu. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **"Upaya Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa Melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan"**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih di dominasi oleh guru.
2. Ketidakterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran hanya terfokus pada guru tanpa adanya interaksi dengan siswa.
3. Pembelajaran yang terfokus pada penghafalan sehingga siswa hanya mampu menghafal pada saat itu saja namun mudah lupa dengan materi yang dihafalkannya.
4. Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran.
5. Penerapan pembelajaran melalui model *Controversial Issues* untuk meningkatkan *Civic Knowledge* siswa yang belum pernah dilaksanakan.

Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dan keterbatasan peneliti, maka masalah yang disebutkan dalam identifikasi masalah diatas dibatasi untuk menerapkan model pembelajaran *Controversial Issues* untuk meningkatkan *Civic Knowledge* siswa kelas VIII di SMP Swasta Karya Bhakti Medan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, peneliti merumuskan rumusan

masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah melalui model pembelajaran *Controversial Issues* dapat meningkatkan *Civic Knowledge* siswa kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti Medan?
2. Bagaimana Peningkatan *Civic Knowledge* siswa kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti Medan ketika diterapkan model pembelajaran *Controversial Issues* di dalam pembelajaran?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Meningkatkan *Civic Knowladge* siswa kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti Medan ketika diterapkan model pembelajaran *Controversial Issues* di dalam pembelajaran.
2. Mengetahui Bagaimana Peningkatan *Civic Knowledge* siswa kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti Medan ketika diterapkan model pembelajaran *Controversial Issues* di dalam pembelajaran.

Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Siswa

   Dapat membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan dengan pembelajaran yang menerapkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperbaiki pengetahuan kewarganegaraan atau *Civic Knowledge* dengan baik.

2. Bagi Guru

Guru dapat memperoleh suatu variasi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas peserta didik.

3. Bagi Sekolah

   Sekolah secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta memperoleh masukan untuk proses pembelajaran berikutnya

4. Bagi Peneliti

   Sebagai bahan pegangan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kelak dapat diterapkan saat terjun kedunia lapangan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1.Kajian Mengenai Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

2.1.1.1. Pengertian Pengetahuan Kewarganegaraan *(Civic Knowledge)*

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memiliki keterampilan intelektual, keterampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga menjadikan warga Negara yang cerdas dan berkarakter.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan diatas dapat dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan yang memiliki komponen-komponen dari unsur-unsur yang terdapat pada pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), sikap kewarganegaraan (*Civic Dispositions*), dan keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), komponen-komponen tersebut yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah tentang pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*).

Berikut ini adalah pengertian *Civic Knowladge* menurut para ahli:

a. Menurut Dwiyono (2016:10-20) “pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara.” Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Adanya aspek tersebut merupakan bidang kajian multidisipliner.

b. *National Center for Learning and Citizenship (NCLC*) (dalam Winarno 2012:108) menyatakan, *civic knowledge* berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya.

c. Budimansyah (2010: 29) mengemukakan bahwa: "Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara".

d. (Dwiyono, 2016:10-20) hal itu dimaksudkan sebagai suatu materi atau hal yang memang setiap warga Negara harus mengetahuinya agar dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat berpartisipasi untuk bangsa dan Negara sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan defenisi-defenisi pengetahuan kewarganegaraan dari para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dari kedua ahli tersebut memiliki pengertian yang hampir sama yaitu "pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga Negara". Secara lebih rinci, materi pengetahuan keterampilan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penelitian yang bebas dan tidak memihak konstitusi serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

2.1.1.2.Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Menurut Margaret (1999:12-15) komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan kedalam lima bentuk pertanyaan yang terus menerus diajukan kepada

siswa agar menjadi warga Negara yang bisa berfikir. Bentuk pertanyaan tersebut, sebagai berikut: apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahannya, apa dasar sistem politik Indonesia, bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 mengejawantahkan tujuan, nilai dan prinsip, bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara lain dan posisinya mengenai masalah nasional, dan apa peran warga dalam demokrasi Indonesia. Kegunaan dari pertanyaan-pertanyaan diatas adalah untuk menunjukkan bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemasaran ide-ide, suatu pencarian baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi.

Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil (*Civil Society*) penting untuk dilakukan agar dapat terus menantang orang-orang yang mau berfikir. Perenungan pertanyaan tersebut hendaknya mengembangkan pemahaman yang lebih besar akan hakikat pentingnya *Civil Society* atau jaringan kompleks, asosiasi-asosiasi politik, sosial dan ekonomi yang dibentuk dengan bebas serta sukarela yang merupakan komponen esensial dan demokrasi konstitusional.

Menurut John J. Patrick and Thomas S. Vont pengetahuan kewarganegaraan memiliki beberapa komponen sebagai berikut.

engidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan

enganalisis dan menjelaskan fenomena

engevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu public

rpikir kritis tentang kondisi kehidupan kemasyarakatan

rpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan

Menurut (Adnan, 2005:72-73), komponen pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan dalam sistem demokrasi, sebagai berikut: konsep sebagai substansi demokrasi, kelangsungan ketegangan yang memunculkan masalah-masalah publik, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan demokratis, fungsi-fungsi lembaga demokratis, praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan perananan warga Negara, konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi, dan sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia. Ada juga komponen *Civic Knowledge* yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan kewarganegaran meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Berdasarkan penuturan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan bernegara. *Civic Knowledge* meliputi kecerdasan, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganagaraan oleh warga Negara.

2.1.1.3 Aspek Kompetensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Adapun materi yang mencakup kedalam aspek pengetahuan yang

digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut (BSNP, 2006:2):

1) Arti kedudukan dan fungsi pancasila: Para pendiri Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati Dasar Negara adalah Pancasila. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Fungsi pancasila : Secara umum fungsi dan peranan Pancasila dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara.

3) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia: Secara umum fungsi dan peranan Pancasila dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara.

4) Kebutuhan warga Negara: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan menghargai keputusan bersama.

5) Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, serta hubungan dasar Negara dengan konstitusi.

6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat demokrasi dan

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani sistem pemerintahan dan pers dalam masyarakat demokrasi.

7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Berdasarkan materi diatas, maka pada penelitian kali ini materi yang digunakan adalah pada Memahami kedudukan dan fungsi pancasila

2.1.1.4.Indikator *Civic Knowledge* atau Pengetahuan Kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh warga Negara

1) Peta Konsep Kajian *Civic Knowledge*

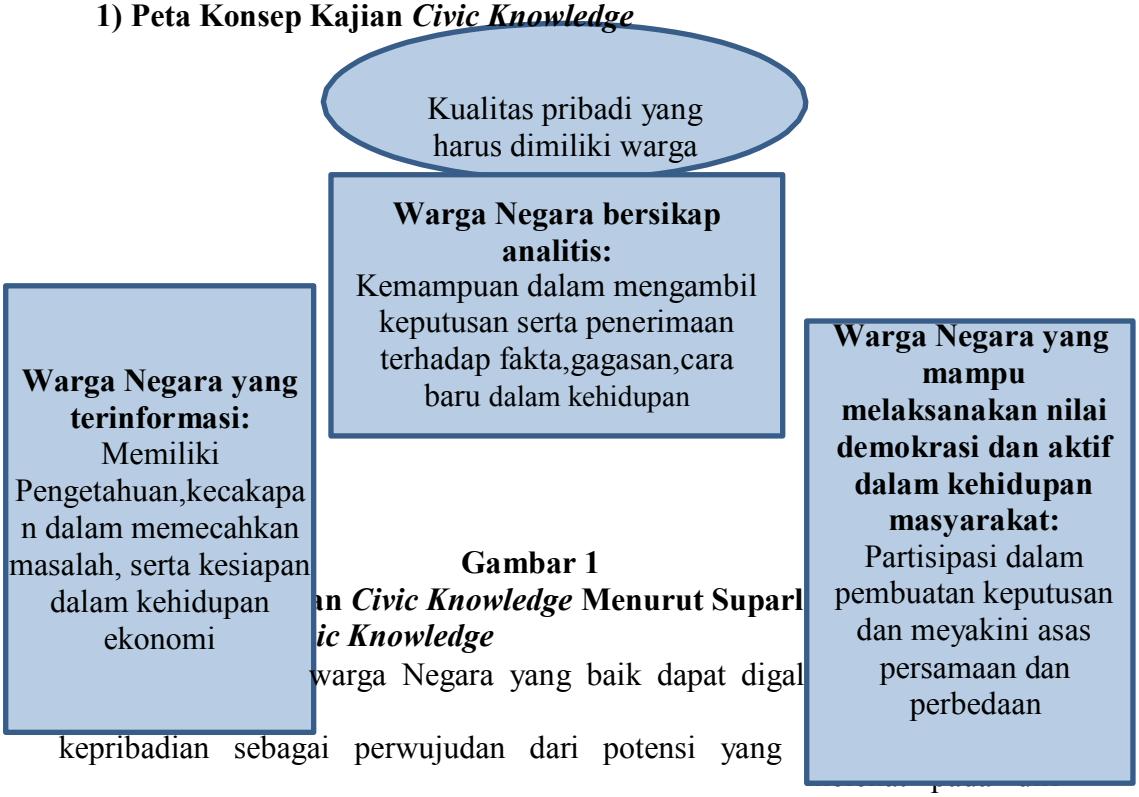

Gambar 1
an *Civic Knowledge* Menurut Suparl
ic Knowledge

warga Negara yang baik dapat digal
kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang
seseorang warga Negara. Ada tiga target dari rumusan itu yang bisa mengantarkan warga Negara memiliki kualitas pribadi yakni: warga Negara yang terinformasi, bersikap analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan

aktif dalam kehidupan masyarakat. Warga Negara yang terinformasi, hendaknya memiliki kualitas kepribadian dalam beberapa hal, yaitu memiliki pengetahuan dan kecakapan memecahkan masalah, memiliki kesadaran akan peranan ilmu pengetahuan kontemporer serta memiliki kesiapan terhadap efektivitas kehidupan ekonomi. Warga Negara bersikap analitis, paling tidak memiliki kualitas dalam hal: kemampuan mengambil keputusan nilai terhadap dunia yang senantiasa berubah, penerimaan terhadap fakta-fakta baru, gagasan-gagasan baru dan cara-cara hidup baru.

Warga Negara yang mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan aktif dalam kehidupan masyarakat, diharapkan memiliki kualitas kepribadian, antara lain: partisipasi dalam pembuatan keputusan, meyakini akan asas persamaan dan kebebasan, menumbuhkan kebanggaan nasional dan kerjasama internasional, menumbuhkan seni kreatif dan perasaan humanistis, memiliki perasaan kemanusiaan terhadap sesama warga Negara serta pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip (Hakim, 2014:10). Menurut Kaelan & Zubaidi (2010:31-36), menjadi warga Negara yang baik juga harus mengetahui akan pentingnya makna-makna yang terdapat pada sila-sila pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat Negara makna sila-sila pancasila merupakan suatu sistem nilai, dimana didalam setiap sila memiliki kandungan nilai yang berbeda-beda namun semuanya itu tidak lain adalah suatu kesatuan yang sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, sebagai berikut:

a) Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa Negara dengan segala hal yang berkaitan didalamnya baik dalam pelaksanaan dan

penyelenggaraan Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai bahwa warga Negara harus menjunjung tinggi HAM, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama yang hal tersebut nantinya dapat menghasilkan adanya sikap saling antar sesama manusia.

c) Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa Negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikatnya kodrat manusia pasti selalu adanya perbedaan oleh karena itu perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai pelengkap bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai warga Negara.

d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara.

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Pengetahuan kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh tanggung jawab dari siswa. Sikap ini disertai dengan perilaku yang: (Bakry, 2008:11-12)

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan Negara.
b) Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c) Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan seseorang.
d) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
e) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusian, bangsa dan Negara.

3) Indikator *Civic Knowledge* yang akan digunakan

Indikator *Civic Knowledge* yang harus dimiliki oleh warga Negara adalah sebagai berikut:

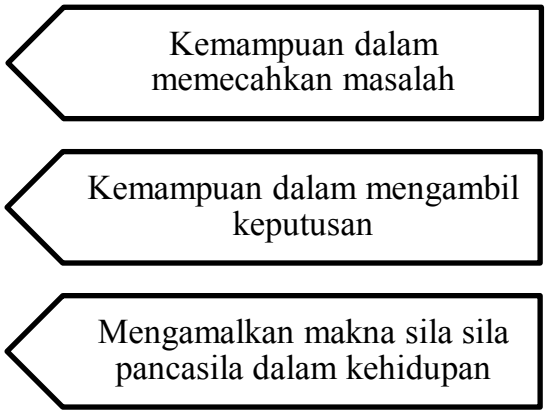

2.1.2 Kajian Tentang Pembelajaran *Controversial Issues*

2.1.2.3 Pengertian Pembelajaran *Controversial Issues*

Isu kontroversial adalah sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh seseorang atau kelompok lain (Muessig dalam Kokom, 2010). Kecenderungan seseorang atau kelompok untuk memihak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan pemikiran tertentu. Apabila orang tidak sependapat, atau terbentuk opini yang bertentangan dalam suatu hal, maka itulah yang disebut isu kontroversial (Wiriatmaja, 2001). Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu, maka materi isu kontroversial secara lansung membangkitkan kemampuan berpikir seseorang. Melalui bacaan atau mendengar mengenai suatu kejadian, maka ia secara spontan bereaksi menentukan kepada pihak mana ia berada. Mungkin juga seorang siswa memerlukan beberapa saat untuk dapat menentukan posisinya.

Keuntungan yang diperoleh melalui pengajaran dengan menggunakan isu kontroversial adalah melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di sini terjadi proses berpikir tingkat tinggi (menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi). Atas dasar perbedaan pendapat itulah dinamika kehidupan akademik dan sosial terjamin

dengan baik. Siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. Perbedaan pendapat yang sering mereka alami di kelas akan pula menjadi dasar bagi mereka untuk terbiasa dengan kondisi semacam itu, sehingga ketika mereka menjadi anggota masyarakat mereka tidak lagi merasa asing.

Menurut Wiriatmadja (2001), keuntungan menggunakan model pembelajaran isu kontroversial adalah:

(1) Mengajarkan kepada peserta didik keterampilan akademis untuk membuat hipotesis, mengumpulkan evidensi, menganalisis data, dan menyajikan hasil inkuiri;

(2) Melatih peserta didik untuk menghadapi kehidupan sosial yang kompleks dengan keterampilan berkomunikasi, menanamkan rasa empati, mempengaruhi orang lain, toleran, bekerja sama, dan lain-lain;

(3) Isu-isu yang dibahas berguna untuk mempelajari studi kasus dengan memahami penggunaan konsep, generalisasi, dan teori ilmu-ilmu sosial.

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model isu controversial dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Wiriaatmadja (2001) tentang langkah-langkah dalam model controversial issues yang diukur melalui kegiatan:

(1) Melakukan brainstorming mengenai isu-isu yang akan dibahas;

(2) Mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok;

(3) Mengarahkan siswa untuk membaca buku dan mengumpulkan informasi lain;

(4) Mengarahkan siswa untuk menyajikan hasil inkuiri, mengajukan argumentasi dan mendengarkan opini dari kelompok lain;

(5) Mengarahkan siswa untuk menerapkan konsep untuk secara akademis menganalisis permasalahan.

Ketika pertama kali menggunakan pembelajaran isu kontroversial, sebaiknya peneliti tidak terlalu banyak mengungkapkan isu yang berbeda. Dua atau tiga isu yang berbeda sudah dianggap cukup. Semakin lama semakin mampu peserta didik berbeda pendapat dengan baik, maka jumlah isu kontroversial pun dapat ditingkatkan.

2.1.3 Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui gambaran penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang dianggap relevan. Beberapa penelitian tersebut mengungkapkan bahwa model pembelajaran *Controversial issues* memiliki pengaruh positif, antara lain: Rohani dan Samsiar tentang Upaya Guru dalam Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa Melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Mujahidin Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran *Controversial issues* memiliki dampak yang sangat positif dalam upaya meningkatkan *Civic Knowledge* siswa pada mata pelajaran PKn. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan ketuntasan siswa yang cukup signifikan dari dua siklus yang dilaksanakan, yaitu

siklus I sebesar 56,75% dan siklus II sebesar 77,14%.

Penelitian lain dilakukan oleh Eni Setyowati tentang Strategi pengembangan media pembelajaran *puzzle games* sebagai upaya meningkatkan *civic knowledge* siswa pada kompetensi dasar menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani, studi kasus di SMAN Mojogedang Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKn, pada kondisi awal dan setelah adanya pembelajaran dengan puzzle games. Sebelum adanya penelitian, nilai rata-rata adalah 65,55 dengan 17 siswa yang hanya mampu mencapai batas tuntas dari 40 siswa yang ada. Setelah dilaksanakannya belajar menggunakan media *puzzle games* terjadi kenaikan rata-rata 72,075 dari 40 siswa yang mampu mencapai batas tuntas naik menjadi 34 siswa.

Penelitian yang dilakukan juga oleh Mangun Dwiyono tentang Peningkatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa melalui media LCD pada materi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kelas VII A SMP Muhammadiyah Sumbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada pembelajaran PKn dengan menggunakan LCD ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil penilaian pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa, pada pra siklus rata-rata kelas 48,5 pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 25,5% dengan rata-rata kelas menjadi 74 dan terjadi peningkatan lagi setelah dilaksanakan siklus II sebesar 13,1% dengan rata-rata kelas yang dicapai adalah 87,1.

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan kewarganegaran seorang siswa dapat ditingkatkan dengan

berbagai macam cara, tergantung bagaimana seorang guru dalam mengatur serta menyampaikannya. Terlihat dari hasil penilaiannya terdapat peningkatan ketuntasan yang signifikan dari beberapa penggunaan model serta media dalam upaya meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic Knowledge*) yang rata-rata hasilnya memuaskan. Dengan begitu maka dapat dipastikan bahwa meningkatkan pengetahuan siswa bisa dilakukan menggunakan model, metode maupun media yang bervariasi.

2.1.4 Kerangka Pemikiran

Pemahaman siswa terhadap pengetahuan kewarganegaraan seharusnya tercipta pada kehidupan mereka secara nyata. Pengetahuan kewarganegaraan itu sendiri adalah sebuah materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga Negara. Pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh warga Negara berupa hak dan kewajiban warga Negara serta pengetahuan terhadap struktur dan sistem politik. Kenyataannya, pemahaman siswa tentang pengetahuan kewarganegaraan masih kurang baik, hal itu dibuktikan dengan belum semua siswa memahami kekuasaan dan politik yang ada di Negara Indonesia.

Beranjak dari hal itu, penggunaan model pembelajaran *Controversial issues* dapat dijadikan solusi agar siswa mencapai *Civic Knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan yang optimal. Melalui model pembelajaran ini siswa belajar untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan opini orang lain, mencari informasi, menyadari adanya perbedaan, membangun empati dan pengertian, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dengan pembelajaran isu-isu kontroversial siswa akan mengamati, memikirkan, dan bertindak menghadapi situasi tertentu, siswa lebih menyakini apa yang diamati dan menemukan banyak

cara untuk mencari jalan keluar tentang isu-isu kontroversial.

Sehingga jika proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *Controversial Issues* dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, mengubah kegiatan siswa menjadi lebih aktif dan tidak membosankan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan *Civic Knowledge* siswa kelas VIII SMP Swasta Kharya Bhakti Medan.

2.1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan (Sanjaya, 2010:125). Berdasarkan Kajian teoritis dan kerangka konseptual,penulis merumuskan hipotesis dalam penelitia ini adalah "Penerapan model pembelajaran *Controversial Issues* dapat meningkatkan Civic Knowledge bagi siswa kelas VIII SMP Swasta Kharya Bhakti Medan Tahun Ajaran 2021/2022.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas *(classroom action research)* dimana penelitian tindakan adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran yang ada dalam kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan *Civic Knowladge* siswa Melalui penerapan model pembelajaran *Controversial Issues.*

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Karya Bhakti Medan yaitu di kelas VIII Pada semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022. Adapun alasan memilih sekolah ini adalah karena penelitian sejenis belum pernah dilakukan di sekolah ini dan didapati pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) siswa masih rendah.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekelompok siswa yang akan dikenai tindakan, sehingga yang menjadi Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII SMP Swasta Kharya Bhakti Medan Tahun Ajaran 2021/2022.

3.3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perubahan yang diinginkan dari objek yang dikenai tindakan, yaitu target yang diharapkan, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan *Civic Knowledge* siswa melalui model pembelajaran *Controversial Issues* di kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti Medan Tahun Ajaran 2021/2022.

3.4. Defenisi Oprasional Penelitian

1. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) yang terdapat pada mata pelajaran PPKn yang berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan atau *Civic Knowledge*.

2. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran aktif menggunakan Model Pembelajaran *Controversial Issues*. Langkahlangkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran *Controversial Issues* yaitu:

1. Melakukan brainstorming mengenai isu-isu yang akan dibahas;
2. Mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok;
3. Mengarahkan siswa untuk membaca buku dan mengumpulkan informasi lain;
4. Mengarahkan siswa untuk menyajikan hasil inkuiri, mengajukan argumentasi dan mendengarkan opini dari kelompok lain;
5. Mengarahkan siswa untuk menerapkan konsep untuk secara akademis menganalisis permasalahan.

3.5. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan adalah hasil akhir yang menjadikan prasyarat bagi siswa untuk tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Indikator keberhasilan yang ingin diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya *Civic Knowledge* pada siswa kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti setelah menerapkan model pembelajaran *Controversial Issues*. Sebagai ukuran

keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa yang nilainya mencapai KKM yaitu 75 dan presentase ketuntasan siswa mencapai lebih dari 70%. Jika hasil belum memuaskan akan dilakukan siklus II begitu seterusnya. Siklus akan berhenti jika hasil siswa sudah memenuhi KKM dan presentase ketuntasan yaitu 70%.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu penataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

Observasi

Suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2009:153). Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut pedoman observasi. Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, karena observasi yang akan dilakukan sudah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian yang dilakukan di SMP Swasta Kharya Bhakti Medan.

2. Tes Tertulis

Tes tertulis merupakan alat penilaian berbasis kelas yang penyajian maupun penggunaannya dalam bentuk tertulis. Bentuk tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat dan uraian. Tes tertulis biasanya

sangat cocok untuk hampir semua kompetensi yang terdapat dalam kurikulum (Arifin, 2009:190). Tes tertulis ini dibuat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa kelas IV serta bentuknya pilihan ganda, isian singkat dan uraian.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:160). Instrumen pada penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran model pembelajaran *Controversial Issues* dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge)* siswa. Instrumen yang digunakan berbentuk tes yang pertanyaannya disusun oleh peneliti. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

3.7.1. Instrumen Tes

Jenis tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian berbasis kelas yang penyajian maupun penggunaannya dalam bentuk tertulis. Bentuk tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat dan uraian.

Tes ini diberikan pada siswa kelas VIII SMP Swasta Kharya Bhakti sebelum dan sesudah dilakukannya pembelajaran dengan penggunaan Model Pembelajaran *Controversial Issues* untuk memperoleh gambaran dari hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilaksanakannya proses pembelajaran. Adapun kisi-kisi pretest dan protest seperti pada table berikut:

Tabel 1
Kisi-kisi Soal *Pretest dan Postest* Siklus I

Mata Pelajaran : PKn
SK : 1.1 Memahami Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara
KD : 1.2 Menjelaskan Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

No	Indikator	No Soal Essay	Tingkat Kesukaran				Aspek		Skor
			Md	Sd	SI	Kg	Af	Psiko	
1	Siswa Dapat Menjelaskan Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara	1				CI			20
2	Siswa Dapat Mengetahui Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa	2				C2			20
3	Siswa Dapat Menghubungkan mengenai pancasila sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa	3				C3			20
4	Siswa dapat Menjelaskan pengertian pancasila sebagai Ideologi Negara	4				C2			20
5	Siswa Dapat Menjelaskan Hubungan Proklamasi dengan Pancasila	5				CI			

Keterangan

Tingkat Kesukaran
Md : Mudah
Sd : Sedang
Sl : Sulit

Aspek
1. Kg : Kognitif
2. Af : Afekrif
3. Psiko : Psikomotorik

Tabel 2
Kisi-kisi Soal *Pretest dan Postest* Siklus II

Mata Pelajaran : PKn

SK : 1.1 Memahami Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara
KD : 1.2 Menjelaskan Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

No	Indikator	No Soal Essay	Tingkat Kesukaran			Aspek			Skor
			Md	Sd	SI	Kg	Af	Psiko	
1	Siswa Dapat Mengetahui Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia	1				C2			20
2	Siswa Dapat Menjelaskan arti Penting Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	2				C2			20
3	Siswa Dapat Mendefenisikan pengertian Pancasila sebagai sumber dari hokum nasional	3				C3			20
4	Siswa dapat Menjelaskan pengertian pancasila sebagai Ideologi Negara	4				C2			20
5	Siswa Dapat Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan bersifat dinamis	5				CI			

Keterangan

Tingkat Kesukaran
1. Md : Mudah
2. Sd : Sedang

Sl : Sulit

Aspek
1. Kg : Kognitif
2. Af : Afekrif
3. Psiko : Psikomotorik

3.7.2. Instrumen Non Tes

1. Lembar Observasi

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru PPKn SMP Swasta Kharya Bhakti Medan. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja guru dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai guru adalah peneliti dan juga aktivitas belajar siswa selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas.

a. Kinerja Guru

Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Tabel 3
Instrumen Penilaian Kinerja Guru dalam penggunaan model pembelajaran *Controversial Issues*

No	ASPEK YANG DIAMATI	SKor
1.	**Kegiatan Awal**	
	a. Memberi Salam dan Berdoa Sebelum memulai pelajaran	
	b. Menyampaikan judul materi serta tujuan pembelajaran	
	c. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif	
	d. Memberikan Soal Postest	
2.	**Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan**	
	a. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa.	
	b.Menyampaikan rencana kegiatan misalnya individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi.	
	c.Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran.	
	d. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata.	
	e.Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat	
	f.Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, konkret ke abstrak)	
3.	**Penerapan Strategi Pembelajaran**	

a. Melaksanakan model pembelajaran *Controversial Issues* melalui kompetensi yang akan dicapai

b. Melakukan brainstorming mengenai isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan materi yang dibahas

c. guru meminta agar membentuk kelompok sesuai dengan absensi

d. siswa berkelompok memilih salah satu kasus atau isu kontroversial untuk dikaji

e. guru mengundang berbagai pendapat setiap kelompok mengenai isu tersebut, Setiap pendapat harus dijelaskan dan diberi alasan mengapa pendapat itu dikemukakan

d. pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroverisial dan dijadikan bahan diskusi kelas

4. **Kegiatan Penutup**

a. Memberikan Penghargaan kepada kelompok

b. Menyimpulkan hasil pembelajaran

c. Memberikan soal posttest kepada peserta didik

d. Mengakhiri pelajaran

Jumlah

Presentase

Panduan dalam penskoran dalam penskoran kinerja guru menggunakan rubrik sebagai berikut:

Tabel 4
Rubrik Penilaian Kinerja Guru dalam penggunaan model pembelajaran *controversial issues*

Skor	Kategori	Indikator
5	Sangat Baik	Dilaksanakan dengan baik oleh guru, guru terlihat professional.
4	Baik	Dilaksanakan dengan baik oleh guru, guru terlihat menguasai.
3	Cukup Baik	Dilaksanakan dengan cukup oleh guru, guru terlihat cukup menguasai.
2	Kurang Baik	Dilaksanakan dengan kurang oleh guru, guru terlihat kurang menguasai.
1	Sangat Kurang	Tidak dilaksanakan oleh guru.

(Rusman,2012:100)

e. Aktivitas Belajar Siswa

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa sebagai berikut:

Tabel 5

Instrumen *Civic Knowledge* Siswa

No	Nama Siswa	Jenis Kegiatan					Jumlah skor	Kriteria Penilaian
		1	2	3	4	5		
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								
Jumlah								
Persentase								

Aspek aktivitas belajar yang diamati dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6

Aspek Penilaian *Civic Knowledge* Siswa

Aspek yang dinilai	Keterangan
1	Memperhatikan Penjelasan Pendidik
2	Bertanya Kepada Pendidik
3	Bekerja sama dengan kelompok
4	Mengerjakan tugas ataupun soal

5 Diskusi dengan anggota kelompok

(Kusnandar,2013:277)

Sedangkan untuk penskoran dalam observasi aktivitas belajar siswa menggunakan rubrik sebagai berikut:

Kriteria Penskoran	**Kriteria Penilaian**
1. 5 = Sangat Baik	1. A =Sangat Baik
2. 4 = Baik	2. B =Baik
3. 3 = Cukup	3. C =Cukup
4. 2 = Kurang	4. D =Kurang
5. 1 = Sangat Kurang	5. E =Sangat Kurang

Presentase ketuntasan peserta didik menggunakan rumus $p = \frac{f}{n} \times 100\%$

Keterangan

P = Pressentase Ketuntasan Peserta didik

F = Jumlah peserta didik yang mendapatkan nilai ≥70

N = Banyak Peserta didik

3.8. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) Perencanaan, (b) Tindakan, (c) Pengamatan, dan (d) Refleksi.Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas maka penelitian ini memiliki beberapa tahap yang merupakan suatu siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapa. Pada penelitian jika

siklus 1 belum tercapai tujuan pembelajarannya maka dapat dilakukan siklus II dan seterusnya. Siklus akan berhenti jika kemampuan *Civic Knowledge* siswa mencapai peningkatan yang klasik. Arikunto (2015: 145) menyatakan bahwa banyaknya siklus tergantung pada kepuasan peneliti sendiri. Biasanya untuk PTK pada kegiatan pengembangan profesi PTK dilakukan dengan tidak kurang dari dua siklus. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam setiap siklus diuraikan sebagai berikut.

3.8.1. Siklus I

Berdasarkan siklus I penelitian tindakan kelas memiliki tahap-tahap sebagai berikut.

3.8.1.1. Tahap Perencanaan I

Pada tahap ini, guru dan peneliti secara kolaboratif membuat rencana pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh peneliti. Pada siklus I ,peneliti merencanakan proses pembelajaran PKn mengenai *Civic Knowledge* melalui model pembelajaran *Controversial Issues*. Adapun langkah-langkah perencanaannya sebagai berikut:

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran *Controversial Issues* pada materi memperkuat komitmen kebangsaan.
b) Mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung
c) melakukan brainstroing mengenai isu-isu kontroversial yang akan dibahas.

d) Membuat instrumen tes yang terdiri dari soal dan kunci jawaban yang akan diberikan pada akhir pertemuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siklus 1.

3.8.1.2. Tahap Pelaksanaan Tindakan I

Setelah tahapan perencanaan selesai dilaksanakan dengan matang, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran *Controversial Issues* seperti yang termuat dalam RPP. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru, dan guru mata pelajaran PKn kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti bertindak sebagai observer (pengamat) berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Adapun tindakan yang dilakukan dalam siklus I adalah :

a. Guru memberikan apresiasi dan motivasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
b. Guru menyajikan informasi atau materi yang akan di pelajari
c. Guru dan siswa melakukan brainstorming mengenai isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan materi yang di bahas.
d. Guru meminta agar siswa membentuk kelompok sesuai dengan absensi
e. Siswa berkelompok memilih salah satu kasus atau isu kontroversial untuk dikaji
f. Guru mengundang berbagai pendapat setiap kelompok mengenai isu tersebut. Setiap pendapat harus dijelaskan dan diberi alasan mengapa pendapat itu dikemukakan.
g. Pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi kelas.

h. Setiap siswa dapat menjadi pembela atau penyerang suatu pendapat tentang isu kontroversial disertai alasan. Hal ini memperlihatkan pula kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing.

i. Guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat.

j. Guru memberikan tes formatif pada siklus I secara individu untuk mengukur hasil belajar dan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diberikan.

3.8.1.3. Tahap Pengamatan I

Pada tahap ini dilakukan secara bersamaan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi tindakan kelas dilakukan oleh peneliti dibantu oleh observer (pengamat) yaitu guru PPKn SMP Swasta Kharya Bhakti Medan, dengan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran. Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan mencatat nilai hasil belajar yang diperoleh dari evaluasi hasil belajar PPKn setelah siklus tindakan dilaksanakan.

3.8.1.4. Tahap Refleksi I

Peneliti bersama guru SMP Swasta Kharya Bhakti melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran *Controversial Issues*, aktivitas belajar siswa (*Civic Knowledge)* serta hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PPKn) selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis data kualitatif

digunakan untuk mengukur kinerja guru dalam penggunaan Model pembelajaran *Controversial Issues* dan aktivitas siswa yang pada penelitian ini mengukur *Civic Knowledge* sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang diperoleh pada saat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PPKn).

3.8.2. Siklus II

Tahap kerja pada siklus II seperti tahap kerja pada siklus I. Dalam hal ini rencana tindakan pada siklus II dilakukan berdasarkan refleksi siklus I. Kegiatan pada siklus II dimaksudkan sebagai penyempurnaan atau perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I.

3.8.2.1. Tahap Perencanaan II

Pada tahap ini, guru dan peneliti secara kolaboratif membuat rencana pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh peneliti. Pada siklus II ,peneliti merencanakan proses pembelajaran PKn mengenai *Civic Knowledge* melalui model pembelajaran *Controversial Issues*. Adapun langkah-langkah perencanaannya sebagai berikut:

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran *Controversial Issues* pada materi memperkuat komitmen kebangsaan.
b) Mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung
c) Melakukan brainstroing mengenai isu-isu kontroversial yang akan dibahas.

d) Membuat instrumen tes yang terdiri dari soal dan kunci jawaban yang akan diberikan pada akhir pertemuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siklus II.

3.8.2.2. Tahap Pelaksanaan Tindakan II

Setelah tahapan perencanaan selesai dilaksanakan dengan matang, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran *Controversial Issues* seperti yang termuat dalam RPP. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru, dan guru mata pelajaran PKn kelas VIII SMP Swasta Karya Bhakti bertindak sebagai observer (pengamat) berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Adapun tindakan yang dilakukan dalam siklus II adalah :

a. Guru memberikan apresiasi dan motivasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
b. Guru menyajikan informasi atau materi yang akan di pelajari
c. Guru dan siswa melakukan brainstorming mengenai isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan materi yang di bahas.
d. Guru meminta agar siswa membentuk kelompok sesuai dengan absensi
e. Siswa berkelompok memilih salah satu kasus atau isu kontroversial untuk dikaji
f. Guru mengundang berbagai pendapat setiap kelompok mengenai isu tersebut. Setiap pendapat harus dijelaskan dan diberi alasan mengapa pendapat itu dikemukakan.
g. Pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi kelas.

h. Setiap siswa dapat menjadi pembela atau penyerang suatu pendapat tentang isu kontroversial disertai alasan. Hal ini memperlihatkan pula kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing.
i. Guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat.
j. Guru memberikan tes formatif pada siklus II secara individu untuk mengukur hasil belajar dan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diberikan.

3.8.2.3. Tahap Pengamatan II

Pada tahap ini dilakukan secara bersamaan pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi tindakan kelas dilakukan oleh peneliti dibantu oleh observer (pengamat) yaitu guru PPKn SMP Swasta Kharya Bhakti Medan, dengan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran. Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan mencatat nilai hasil belajar yang diperoleh dari evaluasi hasil belajar PPKn setelah siklus tindakan dilaksanakan.

3.8.2.4. Tahap Refleksi 1I

Peneliti bersama guru SMP Swasta Kharya Bhakti melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran *Controversial Issues*, aktivitas belajar siswa (*Civic Knowledge)* serta hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PPKn) selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis

tersebut digunakan sebagai acuan perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan tindakan ke siklus berikutnya. Jika analisis yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan maka penelitian bisa dihentikan pada siklus yang bersangkutan.

Secara lebih rinci, prosedur pelaksanaan penelitia tindakan kelas menurut Arikunto (2012) digambarkan sebagai berikut:

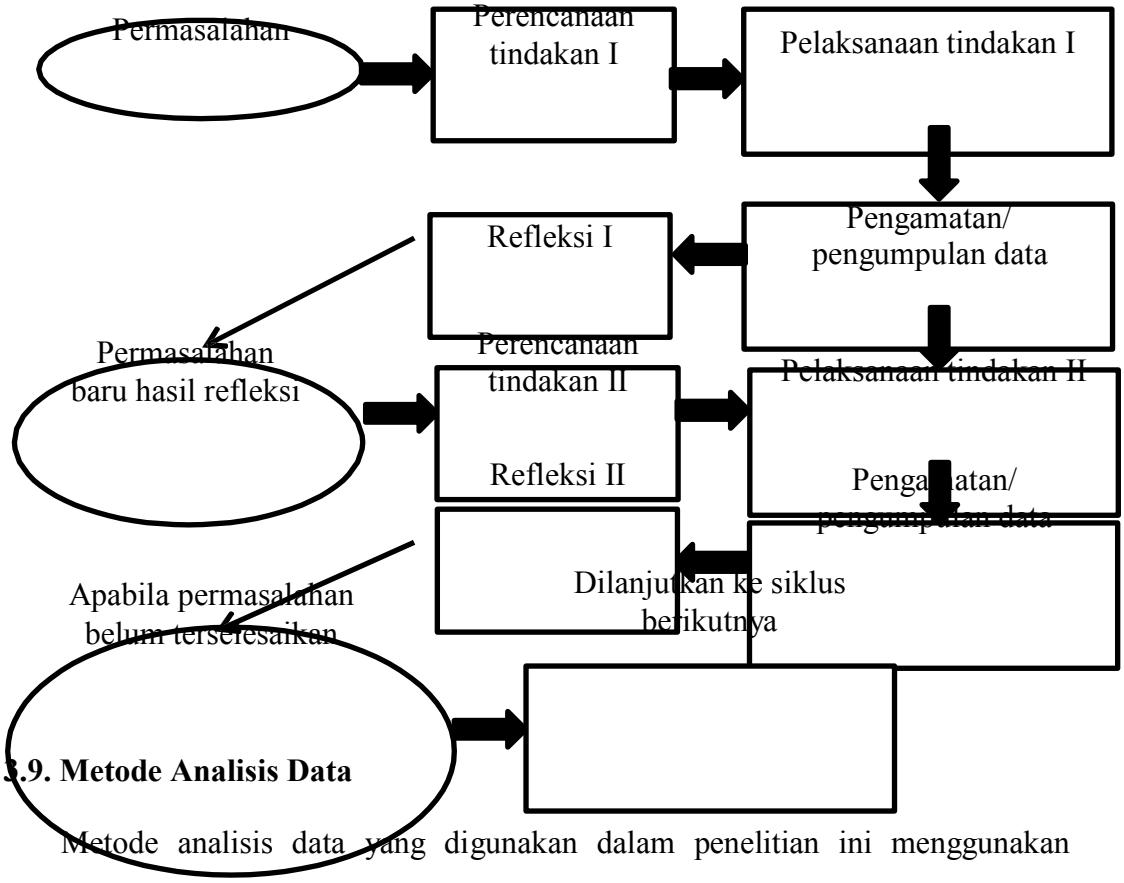

3.9. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif kuantitatif teknik analisis data kualitatif digunakan untuk melihat aktivitas peserta didik dengan lembar observasi dengan menggunakan model pembelajaran *Controversial Issues* Sedangkan Teknik

analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap pemahaman materi ketika dalam proses pembelajaran.

3.9.1. Nilai hasil belajar siswa secara individu

Nilai hasil belajar siswa digunakan rumus**:**

$$\mathbf{N} = \frac{R}{SM} \times 100$$

Keterangan:

N : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Jumlah skor yang diperoleh
SM : Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati
100 : Bilangan tetap

(Purwanto, 2008:108)

Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 7
Pedoman Ketuntasan Hasil Belajar Siswa

Nilai	Keterangan
≥70	Tuntas
≤70	Belum tuntas

3.9.2. Nilai rata-rata hasil belajar siswa

Dihitung dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

$\bar{x}$: rata-rata hasil belajar

$\sum x$: Jumlah nilai tes seluruh peserta didik

N : Jumlah siswa

(Muncarno, 2013:24)

3.9.2 Presentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

Presentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

Digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{N} \times 100\%$$

(Aqib, 2010:41)

Keterangan:

P = Presentase ketuntasan peserta didik

R = Peserta didik yang tuntas belajar

N = Jumlah Peserta didik keseluruhan

3.9.3 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh dari hasil hasil tes dan observasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah adanya peningkatan kemampuan *Civic Knowledge* siswa. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan *Civic Knowledge* siswa dikatakan meningkat, jika di kelas tersebut telah tercapai ≥ 70% dari seluruh siswa yang mengikuti tes mencapai skor ≥ 70.
2. Dari hasil observasi, pembelajaran termasuk dalam kategori baik ataupun sangat baik.

Apabila kedua kriteria keberhasilan yang telah di tentukan peneliti telah tercapai, maka siklus tindakan sudah bisa diberhentikan, namun

apabila keberhasilan belum tercapai maka harus dilanjut ke siklus berikutnya dan demikian seterusnya hingga kedua kriteria keberhasilan yang sudah di tentukan peniliti tercapai.